

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

Putu Sriastuti

Putu.sriastuti10@gmail.com

Lutfi Muta'ali

lutfhfimutaali@ugm.ac.id

INTISARI

Kabupaten Mesuji merupakan daerah pemekaran sejak tahun 2008. Tujuan pemekaran adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 1) mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana sebelum dan setelah adanya pemekaran 2) menganalisis hierarki dan pola persebaran fasilitas pelayanan 3) menganalisis potensi dan kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan didukung dengan adanya observasi pada daerah penelitian untuk mengkaji potensi dan kendala penyediaan sarana dan prasarana. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif.

Hasil penenelitian menunjukkan bahwa : 1) eksistensi dan daya layan fasilitas mengalami peningkatan pasca dimekarkan namun ketersediaan fasilitas pelayanan masih belum mencukupi sehingga memerlukan tambahan fasilitas, 2) Kecamatan Simpang Pematang merupakan daerah paling banyak memiliki fasilitas pelayanan sehingga dapat dijadikan pusat pelayanan bagi kecamatan lainnya. Pola persebaran digunakan untuk perencanaan fasilitas pelayanan dan kebijakan penataan keruangan. 2) Perencanaan strategis menambah jumlah fasilitas yang masih belum melayani masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Kata kunci : Pemekaran wilayah, dampak pemekaran, sarana dan prasarana wilayah

EXPANSION IMPACRT ANALYSIS OF INFRASTRUCTURES AND FACILITIES

MESUJI DISTRICT IN LAMPUNG

Abstract

Mesuji District is area of expansion since 2008. The purpose of expansion is to provide convenience for people . The study was conducted with the purpose 1) identifying facility and infrastructure condition before and after 2) analyze the hierarchy and distribution pattern of service facilities 3) analyzing potential and constraints of facilities and infrastructure.

This study uses quantitative methods and supported by the observations of the study area to assess the potential and constraints of facilities and infrastructure. The analysis technique used is quantitative descriptive analysis techniques.

The results showed that: 1) the existence and power facilities increased serviceability post bloomed but the availability of service facilities is still inadequate and require additional facilities, 2) Simpang Pematang is most service facilities that can be used as the service center for other districts. Distribution pattern is used for planning facilities and spatial planning policy. 2) Strategic planning is increasing the number of facilities that are still not able to serve and improve the quality of service.

Keywords: Expansion of the region, the impact of the expansion, facilities and infrastructure of the area

Pendahuluan

Kabupaten Mesuji awalnya merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Tulang Bawang dengan wilayah administratif seluas 7.770,84 Km². Berdasarkan angka tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 10% per tahun, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.084.644 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 140 jiwa/km². Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pemekaran sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat terjangkau dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Setelah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, Kabupaten Mesuji akhirnya resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang secara yuridis berdiri sejak tanggal 26 November 2008, pada saat undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tersebut disahkan. Pembentukan Kabupaten Mesuji ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu untuk mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang, memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan secara teknis administratif memenuhi persyaratan untuk pembentukan suatu Daerah Otonomi Baru.

Pemekaran wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang lebih maksimal bagi masyarakat. Indikasi keberhasilan

pemekaran wilayah adalah terjadinya peningkatan prasarana pembentuk sistem integrasi wilayah seperti transpotasi, energi, dan sarana pelayanan publik meliputi pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan sarana ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana sebelum dan setelah adanya pemekaran
2. Menganalisis hierarki dan persebaran fasilitas pelayanan
3. Menganalisis Potensi dan kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara pengumpulan data sekunder di instansi pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, jalan dan listrik. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif. Penyajian data-data tersebut kedalam tabel dan diagram. Sesuai dengan tujuan pertama yaitu mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana maka di analisis berdasarkan eksistensi, daya layan, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Eksistensi sarana dan prasarana disajikan dalam bentuk tabel dan diagram yang memuat informasi mengenai eksistensi sarana dan prasarana baik sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah kemudian dapat diketahui perbandingan eksistensinya. Daya layan merupakan analisis untuk memberikan indikasi kualitas dan tingkat ketercukupan pelayanan, sehingga semakin baik daya layan, kualitas fasilitas juga semakin baik. Sedangkan jika memiliki standart pelayanan minimal (SPM) tertentu, maka kondisi daya layan lebih baik jika nilainya

melebih standar yang ditetapkan. Selain bertujuan mengetahui daya layan, efektivitas kualitas daya layan juga perlu dianalisis untuk mengetahui pelayanan fasilitas i sudah efektif atau tidak efektif dalam melayani penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya, mengetahui ketersediaan fasilitas yang dilakukan dengan cara menganalisis tingkat keterkecukupan fasilitas pelayanan yang ditentukan dengan membandingkan ketersediaan fasilitas yang ada dengan kebutuhan fasilitas yang dihitung dengan menggunakan threshold standar pelayanan minimal. Tingkat keterkecukupan fasilitas pelayanan juga seringkali disebut dengan daya dukung fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang ada.

Tujuan kedua adalah menganalisis hierarki dan pola persebaran fasilitas pelayanan. Analisis hierarki dilakukan dengan menggunakan skalogram dan indeks sentralitas yang bertujuan untuk memberikan gambaran hubungan antara distribusi penduduk dan fasilitas pelayanan dan secara cepat mampu menyajikan urutan tingkat perkembangan suatu wilayah yang bermanfaat bagi perencanaan struktur ruang dan pusat pertumbuhan. Analisis pola persebaran fasilitas pelayanan dilakukan dengan menggunakan analisis data spasial. Analisis spasial merupakan sekumpulan cara untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola dari sebuah fenomena spasial sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Kemudian untuk mengetahui pola persebaran fasilitas pelayanan digunakan analisis tetangga terdekat yang memiliki kriteria nilai T antara lain nilai 0,00-0,70 adalah pola mengelompok, 0,70-0,140 pola tersebar tidak merata, dan 1,40-2,149 pola tersebar merata (Nursid, 1998)

Tujuan terakhir adalah menganalisis potensi dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Metode yang digunakan adalah analis SWOT.

Potensi dan kendala dapat berasal dari internal dan eksternal, dari hasil *indepth interview* yang dimaksud kemudian dilakukan penilaian dengan menggunakan metode analis SWOT yang diharapkan akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman darimasing-masing aspek dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sarana dan Prasarana sebelum dan Setelah adanya pemekaran

Ketika membandingkan sarana dan prasarana sebelum dan sesudah pemekaran maka dengan sendirinya akan membahas kondisi yang ada di Kabupaten Mesuji pada pra pemekaran. Kabupaten Mesuji sebelum dimekarkan merupakan sebuah kecamatan yaitu kecamatan Mesuji yang memiliki luas wilayah 312.568,00 Ha dengan jumlah penduduk 20.039 jiwa dengan tingkat kepadatan 6/km². Kecamatan Mesuji kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Mesuji yang memiliki tujuh kecamatan diantaranya kecamatan Way Serdang, Simpang Pematang, Panca Jaya, Tanjung Raya, Mesuji, Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara. Berdasarkan fokus penelitian yaitu dampak pemekaran terhadap sarana dan prasarana wilayah maka terlebih dahulu akan digaris bawahi sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Mesuji sebelum dan setelah adanya pemekaran wilayah. Data yang digunakan adalah data tahun 2009 dan 2014. Kondisi sarana dan prasarana wilayah dapat dilihat berdasarkan eksistensi, daya layan fasilitas, dan tingkat keterkecukupan fasilitas pelayanan yang ada di Kabupaten Mesuji.

Eksistensi fasilitas pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintah, jalan dan energi listrik mengalami peningkatan pasca dimekarkan.

Eksistensi fasilitas pendidikan mengalami peningkatan dari total 164 menjadi 166. Peningkatan terjadi pada sekolah SMP dan SMA. Eksistensi fasilitas kesehatan mengalami peningkatan sebanyak 72 dari total 189 menjadi 261. Eksistensi fasilitas ekonomi mengalami peningkatan sebanyak 117 dari 42 menjadi 159. Peningkatan yang paling banyak terjadi pada fasilitas koperasi. Fasilitas pemerintah terjadi peningkatan hanya pada fasilitas kantor polisi sebanyak dua dari satu menjadi tiga. Selanjutnya, kualitas jalan Kabupaten mengalami perubahan dimana panjang jalan yang berkualitas baik sebelum dimekarkan sepanjang 112, 16 km kemudian setelah dimekarkan mengalami peningkatan panjang jalan sebanyak 132, 67 km yang artinya ada peningkatan sepanjang 20,07 km. Panjang jalan dengan kualitas sedang sebelum dimekarkan sepanjang 124, 48 km namun setelah adanya pemekaran panjang jalan kualitas sedang meningkat menjadi 237,60 km yang artinya ada peningkatan sepanjang 113,12 km sedangkan panjang jalan dengan kualitas rusak sebelum dimekarkan sepanjang 224, 98 km dan setelah dimekarkan berkurang menjadi 169,90 km artinya kondisi jalan rusak berkurang sepanjang 55,08 km. Fasilitas listrik yang awalnya hanya ada 12 gardu kemudian bertambah menjadi 132 gardu. Dari jumlah pelanggan listrik dari keseluruhan yang awalnya hanya berjumlah 1.676 pelanggan kemudian setelah adanya pemekaran bertambahan menjadi 18.819 pelanggan.

Selanjutnya, daya layan fasilitas pelayanan yang ada di Kabupaten Mesuji. Daya layan merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan fasilitas pelayanan dengan variabel pembanding yaitu jumlah penduduk. Daya layan memberikadikasi kualitas dan tingkat keterkecukupan pelayanan, sehingga semakin baik daya layan, kualitas fasilitas juga semakin baik. Efektivitas daya layan dapat dilihat dari nilai EDL. Berdasarkan

tabel jika dilihat dari nilai EDL (Efektivitas Daya Layan) dimana $EDL > 1$ menunjukkan bahwa pelayanan fasilitas i efektif tetapi jika nilai $EDL < 1$ pelayanan fasilitas i tidak efektif.

Tabel 1 Efektivitas Daya Layan Fasilitas Pendidikan

Kecamatan	SD		SMP		SMA	
	EDL	EDL	EDL	EDL	EDL	EDL
Way Serdang	1.1	0.9	1.1	1.0	0.2	0.3
Tanjung Raya	0.9	1.0	0.8	1.2	0.3	0.3
Mesuji Timur	1.1	0.9	1.6	1.3	0.4	0.3
Simpang Pematang	0.9	0.9	1.0	1.8	0.4	0.2
Rawajitu Utara	0.9	1.0	0.4	0.6	0.0	0.4
Mesuji	1.4	1.2	1.2	1.4	0.0	0.2
Panca Jaya	1.0	0.9	0.7	0.6	0.0	0.0

Keterangan :

Warna Hijau : Sebelum dimekarkan

Warna Kuning : Setelah dimekarkan

Tabel 2 Efektivitas Daya Layan Fasilitas Ekonomi

Kecamatan	Bank		Pasar		Koperasi		Penggadaian	
	EDL	EDL	EDL	EDL	EDL	EDL	EDL	EDL
Way Serda ng	0.0	2.8	0.8	6.4	1.3	0.8	0.0	0.7
Tanjung Raya	0.0	6.8	0.9	2.5	7.4	2.6	0.0	0.8
Mesuji Timur	0.0	0.0	1.1	3.9	7.4	1.7	0.0	1.0
Simpang Pematang	5.0	15.0	1.3	3.7	5.3	1.9	1.3	3.7
Rawajitu Utara	0.0	0.0	1.2	1.3	2.1	1.1	0.0	0.0
Mesuji	6.0	5.9	1.5	2.9	6.2	1.7	0.0	1.5
Panca Jaya	0.0	0.0	2.1	5.7	1.7	1.0	0.0	0.0

Tabel 3 Efektivitas Daya Layan Fasilitas Kesehatan

Kecamatan	RS		Pustu	Praktek Dokter		Praktek Bidan	
	E D L	ED L	EDL	EDL	EDL	EDL	EDL
Way Serdang	0. 0	0. 0	5.4	2. 1	0.0	0. 2	0. 2
Tanjung Raya	0. 0	0. 0	0.0	2. 5	0.4	0. 4	0. 4
Mesuji Timur	0. 0	0. 0	10.0	5. 9	1.1	0. 3	0. 3
Simpang Pematang	0. 0	10. .0		10.		0. 0	0. 0
Rawajitu Utara	0. 0	0. 0	7.5	5. 0	0.4	0. 2	0. 6
Mesuji	0. 0	0. 0	9.0	10. .3	0.0	0. 2	0. 5
Panca Jaya	0. 0	0. 0	6.2	21. .1	0.3	0. 3	0. 6

Jika melihat tabel satu, dua, dan tiga maka dapat terlihat bahwa pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Mesuji memberikan peningkatan pada efektivitas daya layan fasilitas pelayanan meski tidak terlalu signifikan. Pada tabel 3 efektivitas daya layan fasilitas kesehatan tidak memuat informasi EDL fasilitas pelayanan puskesmas dan pustu dikarena dari sebelum dimekarkan baik setelah dimekarkan dua fasilitas tersebut sudah dapat melayani masyarakat secara efektif dengan nilai EDL $EDL > 1$

Selanjutnya adalah analisis tingkat kecukupan fasilitas pelelayanan menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten membutuhkan tambahan fasilitas. Fasilitas pendidikan membutuhkan tambahan sebanyak 39 sekolah yang sebagian besarnya memerlukan tambahan, sekolah adalah SMA yaitu sebesar 28 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan dimana seluruh

kecamatan membutuhkan tambahan fasilitas sekolah SMA. Selanjutnya adalah sekolah SD yang memerlukan tambahan sebanyak 8 sekolah yang tersebar di kecamatan Way Serdang, Tanjung Raya, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Panca Jaya sedangkan dua kecamatan lainnya yaitu Mesuji justru kelebihan dua sekolah SD dan Kecamatan Rawajitu Utara tidak kekurangan maupun kelebihan sekolah SD. Sekolah SMP paling sedikit memerlukan tambahan yaitu hanya 3 fasilitas sekolah saja yang harus ditambah di Kecamatan Rawajitu Utara dan Panca Jaya.

Sedangkan fasilitas ekonomi tidak membutuhkan tambahan dan tingkat pelayanan mencukupi atau surplus sebanyak empat fasilitas. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang paling banyak membutuhkan tambahan sebesar 125 Fasilitas. Rumah sakit, Praktek dokter, Praktek bidan, Balai pengobatan merupakan fasilitas-fasilitas yang memerlukan karena keberadaan fasilitas tersebut tidak mampu mendukung kebutuhan penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji.

Hirarki dan Pola Persebaran Sarana dan Prasarana

Salah satu indikator dalam melihat suatu perkembangan wilayah secara kuantitatif adalah dengan memperhitungkan jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia di Kabupaten Mesuji. Tingkat pelayanan fasilitas dengan melihat hasil yang diperoleh dari Indeks Sentralitas. Tujuan dari penentuan hirarki pusat pelayanan adalah memberikan gambaran hubungan antara distribusi penduduk dan fasilitas social ekonomi secara cepat mampu menyajikan urutan tingkat perkembangan wilayah yang bermanfaat bagi perencanaan struktur ruang dan pusat pertumbuhan.

Tabel 4 Hirarki Pusat Pelayanan

Kecamatan	Jmlh pddk	IS	Hirarki
Way serdang	42490	178.5	II
Tanjung Raya	35313	211.8	II
Mesuji Timur	30509	153.5	III
Simpang Pematang	24450	311.8	I
Rawajitu Utara	23925	166.8	III
Mesuji	20413	178.5	II
Panca Jaya	15659	116.8	III

Pola persebaran fasilitas pelayanan di masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten Mesuji dapat dilihat dari besarnya nilai T, menurut Nursid Sumaatmadja (1998) kriteria nilai $T=0,00-0,70$ termasuk kedalam pola mengelompok, $T=0,70-1,40$ merupakan pola tersebar tidak merata, dan $T=1,40-2,1491$ termasuk kedalam pola tersebar merata.

Tabel 5 Pola Persebaran fasilitas Pendidikan

Kecamatan	Pendidikan	
	T	Pola
Way Serdang	1.74	Tersebar Merata
Simpang pematang	1.95	Tersebar Merata
Panca Jaya	0.85	Tersebar Tidak Merata
Tanjung Raya	0.09	Mengelompok
Mesuji	2.01	Tersebar Merata
Mesuji Timur	0.99	Tersebar Tidak Merata
Rawajitu Utara	0.95	Tersebar Tidak Merata

Tabel 6 Pola Persebaran Fasilitas Kesehatan

Kecamatan	Kesehatan	
	T	Pola
Way Serdang	2.05	Tersebar Merata
Simpang pematang	1.28	Tersebar Tidak Merata
Panca Jaya	0.81	Tersebar Tidak Merata
Tanjung Raya	0.53	Mengelompok
Mesuji	2.03 3	Tersebar Merata
Mesuji Timur	1.36	Tersebar Tidak Merata
Rawajitu Utara	0.93	Tersebar Tidak Merata

Tabel 7 Pola Persebaran Fasilitas Ekonomi

Kecamatan	Ekonomi	
	T	Pola
Way Serdang	2.01 8	Tersebar Merata
Simpang pematang	1.85	Tersebar Merata
Panca Jaya	0.88	Tersebar Tidak Merata
Tanjung Raya	0.69	Mengelompok
Mesuji	1.25	Tersebar Tidak Merata
Mesuji Timur	1.4	Tersebar Tidak Merata
Rawajitu Utara	0.33	Mengelompok

Teridentifikasinya pola persebaran fasilitas pelayanan pada suatu wilayah sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan fasilitas pelayanan dan kebijakan dalam penataan keruangan. Diketahui bahwa di Kabupaten Mesuji ada dua kecamatan yang memiliki pola persebaran fasilitas yang merata yaitu Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Way Serdang sedangkan lima kecamatan lainnya belum maksimal dalam mendapatkan fasilitas pelayanan dikarena pola

persebaran fasilitas pelayanan yang tersebar secara tidak merata.

Potensi dan Kendala Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana

Wawancara dilakukukan kepada Bapak Sukarman selaku kepala Bappeda Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonom Baru sehingga memiliki banyak sekali pekerjaan rumah namun hal ini belum didukung oleh dana yang mencukupi selain itu Mesuji merupakan daerah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal lain yang menjadi kendala dalam pembangunan adalah jalan yang masih belum optimal sehingga dalam proses pemerataan pembangunan dimasing-masing kecamatan menjadi terhambat.

Kabupaten Mesuji memiliki karakteristik fisik yang berpotensi dimana keadaan tanah yang subur sehingga banyak jenis pertanian dan perkebunan yang berkembang cukup bagus. Seperti kebun kelapa sawit, kebun singkong, kebun karet, dan sawah menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat. Selain itu topografi yang relatif landai memudahkan dalam pemanfaatan lahan sebagai kegiatan pertanian maupun kegiatan lainnya dan juga masih banyak lahan Mesuji yang dapat dikembangkan untuk pertanian dan perkebunan bahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana juga masih tersedia luas.

Kabupaten Mesuji merupakan daerah pemekaran yang tentunya masih banyak memiliki pekerjaan rumah sehingga dibutuhkan daya dorong yang besar. Rencana strategis dapat digunakan sebagai daya dorong untuk pembangunan wilayah tersebut. Rencana strategis disusun sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang,

dan ancaman dari masing-masing fasilitas. Rencana strategis untuk fasilitas pendidikan yaitu menambah fasilitas sekolah SD, SMP, dan SMA serta menambah tenaga kerja guru. Fasilitas kesehatan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan seperti menyediakan rawat inap bagi RS, memperbaiki bangunan fisik yang mulai rusak bagi puskesmas dan pustu. Sedangkan praktik dokter dan praktik bidan yaitu perekutan Bidan dan dokter pegawai tidak tetap daerah atau non PNS. Penambahan juga dilakukan pada balai pengobatan. Rencana strategis untuk listrik adalah membangun iklim investasi yang baik dibidang kelistrikan sehingga kebutuhan listrik dapat terpenuhi, menjaga efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam yang diperlukan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah, dan menerapkan kebijakan tarif listrik yang tidak seragam (nonuniform tariff), dengan pertimbangan adanya perbedaan perkembangan pembangunan ketenagalistrikan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya dan kemampuan bayarMasyarakat yang berbeda.

Rencana strategis jalan yaitu melakukan teknik pengecoran jalan sehingga lapisan tanah tidak mudah ambles, memperbaiki sistem drainase jalan dan juga melakukan perbaikan pada jalan-jalan yang rusak dan membuka daerah yang terisolasi dengan membuat jalan-jalan penghubung. Selanjutnya adalah rencana strategis yang dilakukan pada bank dan penggadaian dengan cara menambah jumlah bank sebanyak 3 dan penggadaian sebanyak dua sehingga dapat melayani masyarakat dengan optimal.

KESIMPULAN

1. Eksistensi fasilitas pelayanan dan daya layan fasilitas mengalami peningkatan pasca Kabupaten Mesuji dimekarkan namun ketersediaan jumlah fasilitas pelayanan yang ada masih belum mencukupi sehingga memerlukan tambahan fasilitas.
2. Hasil perhitungan indeks pelayanan fasilitas publik sebesar 76,14 menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan melayani kebutuhan fasilitas dasar bagi penduduknya sudah cukup baik.
3. Kecamatan Simpang Pematang merupakan daerah yang paling banyak memiliki jenis fasilitas pelayanan sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan bagi kecamatan-kecamatan lainnya
4. Pola persebaran fasilitas pelayanan di Kabupaten Mesuji lebih banyak menyebar secara tidak merata dibandingkan menyebar secara merata. Teridentifikasinya pola persebaran fasilitas dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan fasilitas pelayanan dan kebijakan penataan keruangan.
5. Potensi yang mendominan adalah karakteristik wilayah yang mendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana sedangkan kendala yang dihadapi adalah infrastruktur jalan yang kurang memadai, anggaran dana dan luas wilayah Kabupaten Mesuji.
6. Rencana strategis terhadap fasilitas pelayanan adalah menambah jumlah fasilitas yang masih belum mampu melayani masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan dampak adanya pemekaran wilayah Kabupaten Mesuji khususnya dibidang sarana

dan prasarana wilayah Kabupaten Mesuji

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), *Evaluasi Kebijakan Pembentukan DOB, Kajian Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur dan Keuangan di DOB*, Direktorat Otda Bappenas-Jakarta.
- Bintarto, 1977. *Pola Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
- Creswell. John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Data BPS (2008-2014). *Mesuji Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik, Lampung.
- Departemen Dalam Negeri. (2005), *Sinopsis Penelitian : Efektifitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Jakarta
- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta (2007), *Rencana*
- Program Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Bidang PU/Cipta Karya Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012, Pemerintah Kota Yogyakarta, Yogyakarta.
- Freddy Rangkuti, 2004, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Graedia, Jakarta

Kodoatie Robert J 2003.*Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Laode Ida (2005), *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia.* Media Indonesia,22 Maret 2005

Muta'ali Lutfi. 2013 Penataan Ruang Wilayah Dan Kota. Fakultas Geografi, Universitas Gagah Mada, Yogyakarta

Muta'ali Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional.* Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

NuarsaI Wayan, 2005, *Menganalisa Data Spasial dengan ArcView GIS 3.3,* Penerbit Informatika, Bandung.

Rijanta. 2012. *Ilmu Wilayah.* Materi Kuliah Ilmu Wilayah. Fakultas Geografi, Yogyakarta

Saile, Said. 2009. *Pemekaran Wilayah : Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia.*: Restu Agung,Jakarta

Sugiyono, 2004, *Statistik Penelitian,* Bandung: Alpa Beta

Tarigan, Antonius. (2010). Dampak Pemekaran Wilayah. Majalah Perencanaan Pembangunan 01: 22-2